

**Evaluasi Tingkat Kompetensi Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(Competency Level Evaluation of Administrators of Community Learning Center
(PKBM) In The Province Of Daerah Istimewa Yogyakarta)**

oleh: Iis Prasetyo, MM.

Abstract

This paper aimed to describe the results of the evaluation of administrators competency level of Community Learning Center (PKBM), so that it can provide an understanding of the PKBM administrators existing competencies level and can be known what they achieve yet and other information relating to it competency. this paper also expected to obtain the benefits of a description of existing condition and then can be used as a reference for program planners of improving competence of PKBM administrators in the Province of Daerah Istimewa Yogyakarta.

The methods used in the research are quantitative descriptive research, the population of this research are includes the administrators of PKBM in the DIY, which consist of four districts and one municipality, including: Sleman Regency, Bantul Regency, Kulonprogo Regency, Gunung Kidul Regency and the City of Yogyakarta, which amounted to 100 people. Dominant instrument data collection in this research is questionnaire and the addition tools such as observation and documentation is used. Data collected through questionnaire later was analyzed by quantitative method. The unit of analysis includes average the basic competency in each of the Average narrowed with each indicator so that the distribution of classification based on the standard relative value or norm-referenced, where the position is someone always connected with other in the group.

The results of study showed that the characteristics of PKBM administrators is a variety ranging from types of work, sex and educational level. The characteristics contribute to the quality of administrators competency. Related to the level of administrators competence, the results showed that the number of administrators with good qualifications is very low when compared with the number of less good qualifications administrators. The impact of this lack of competence can be seen from the not developed condition of PKBM, monotonous activities, always waiting for funding activities stimulus from government projects, implementation programs that are not consistent with the proposal and other. This condition indicates that PKBM administrators task can't be implemented well by most administrators because of their competency levels are less good.

Keyword: evaluation, competency, PKBM

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan sektor penting yang berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan bangsa. Apabila melihat kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan terutama untuk masyarakat ekonomi menengah kebawah. Mahalnya biaya pendidikan menjadi faktor utama bagi masyarakat sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan bahkan sampai sekolah dasar sekalipun.

Randahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan mengakibatkan semakin meningkatnya angka kemiskinan dan kebodohan dan tidak jarang dijumpai masyarakat yang mengalami buta huruf sebagai konsekuensi dari kurangnya pendidikan bagi mereka. Untuk mengurangi masalah tersebut perlu adanya layanan pendidikan yang dapat menyentuh masyarakat hingga lapisan bawah, dimana pendidikan tidak hanya memusatkan pada jalur pendidikan formal saja, melainkan melalui jalur pendidikan lain yaitu pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal atau Pendidikan Luar Sekolah dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak mungkin terlayani pendidikannya di jalur pendidikan formal. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola program PLS dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan program pendidikan di jalur Pendidikan Luar Sekolah adalah terbentuknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat daerah yang dikelola oleh lembaga kemasyarakatan daerah setempat. PKBM merupakan salah satu ujung tombak pengembangan program PLSP ditingkat lapangan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dari sini diharapkan pengelola PKBM mampu mengembangkan dirinya secara maksimal dalam melayani dan mengembangkan program pemberdayaan di masyarakat.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih dan dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat. Hal ini selaras dengan pemikiran bahwa dengan melembagakan PKBM akan banyak potensi yang selama ini tidak tergalikan akan dapat digali, ditumbuhkan, dimanfaatkan dan didayagunakan. PKBM hendaknya menjadi pemicu dan penyulut motivasi dan kreasi masyarakat.

Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan tindak lanjut dari gagasan *Community Learning Center* telah dikenal di Indonesia sejak tahun enam puluhan. Secara kelembagaan, perintisannya di Indonesia dengan nama PKBM baru dimulai pada tahun 1998 sejalan dengan upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan (Sudjana, 2003, 2).

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah tempat pembelajaran dalam bentuk berbagai macam keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana, dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat, agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya (BPKB Jatim, 2000, 6).

Pada prinsipnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan memperhatikan segala potensi yang ada disekitarnya. Oleh karena itu dalam proses pembentukan dan penyelenggaraannya lebih menggunakan metode/pendekatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yang secara garis besar prinsip-prinsipnya meliputi: belajar dari masyarakat, masyarakat sebagai subyek, saling membelajarkan, pemberdayaan masyarakat, mengenai potensi dan penyadaran, perumusan masalah dan penentuan prioritas, identifikasi pemecahan masalah, pemilihan alternatif pemecahan, perencanaan dan penyajian rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan supervisi, dan evaluasi (BPKB Jatim. 2000. 11).

Maju dan mundurnya suatu PKBM sangat ditentukan oleh kualitas pengelola yang berfungsi sebagai perencana, pelaksana, evaluator dan pengembang program yang diselenggarakan di PKBM. Pada prinsipnya pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti penyelenggaraan, menurut Hersey dan Blanchard (1982) didefinisikan sebagai berikut: "*management as working together with or through people, individual or groups, to accomplish organizational goal*" jika diartikan manajemen adalah kegiatan bekerjasama atau melalui orang lain, baik perorangan maupun kelompok, untuk mencapai tujuan organisasi (Sudjana, 2003:1).

Menurut Winarno Hamiseno, pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian (Arikunto, 1993:8). Selanjutnya pengelolaan menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Definisi lain menyebutkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau perumusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efisien (Arikunto, 1993:8). Dijelaskan pula bahwa pengelolaan meliputi banyak kegiatan dan semuanya itu bersama-sama menghasilkan suatu hasil akhir yang memberikan informasi bagi penyempurnaan perkegiatan.

Pengelola PKBM adalah tenaga kependidikan luar sekolah bukan pegawai negeri yang direkrut untuk mengelola kegiatan operasional program di PKBM mulai dari merencanakan, melaksanakan, membimbing, menilai dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan program-program PLS dilapangan terutama program pendidikan masyarakat (Direktorat Dikmas, 1998).

Tugas pokok seorang pengelola PKBM adalah dalam hal mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat, merencanakan pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membina pelaksanaan program, melakukan penilaian terhadap program yang berjalan dan melaporkan pelaksanaan program kepada pejabat terkait.

Sebagai tenaga pengelola PKBM, maka secara rinci tugas Pengelola PKBM adalah (BPPLSP, 2004:9):

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dasar.
- b. Mengadakan konsolidasi program
- c. Menyusun program belajar sesuai kebutuhan belajar masyarakat dan membuat peta program di setiap desa.
- d. Menyusun rencana kerja mingguan, bulanan, tengah tahunan dan tahunan.
- e. Menyiapkan kebutuhan administrasi pelaksanaan program.
- f. Mencarikan dan menyiapkan kebutuhan buku, alat, tenaga / lembaga yang diperlukan dalam pelaksanaan program.
- g. Mencatat kemajuan belajar warga belajar.
- h. Mengamati dan mencatat pelaksanaan program belajar mengajar.
- i. Mengawasi dan mengendalikan semua pelaksanaan program belajar.
- j. Menyusun laporan bulanan, triwulan, tengah tahunan dan tahunan.
- k. Memberikan saran-saran perbaikan program atau mengembangkan program belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi dan situasi daerah.
- l. Memilih dan menentukan calon warga belajar untuk setiap jenis program belajar (Paket A, Paket B, Paket C, Kejar Usaha, Beasiswa, Magang, Kursus Diklusemas, dan sebagainya).
- m. Mengadakan rintisan program yang inovatif sesuai dengan potensi, kondisi dan situasi lingkungan sekitar.
- n. Mengembangkan jaringan kerja, baik dengan dinas / instansi terkait, dunia usaha dan lembaga keuangan.
- o. Mengembangkan usaha produktif sesuai dengan permintaan pasar.

Perlu disadari pula bahwa latar belakang pendidikan pengelola PKBM sangat heterogen, oleh karena itu pelatihan teknis baik sebelum maupun selama melaksanakan tugas sangatlah perlu dilakukan. Berbagai pelatihan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola PKBM, sehingga dari pelatihan ini akan muncul pengelola PKBM dengan kemampuan yang memadai dan mempunyai motivasi dan kemauan kerja yang tinggi. Dengan meningkatnya kualitas seorang pengelola PKBM sudah pasti akan mempengaruhi tingkat keberhasilan program PLSP di masyarakat yang ditangani oleh pengelola PKBM.

Partisipasi lulusan jurusan pendidikan luar sekolah yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaan PKBM juga dinilai masih sangat rendah, baik itu partisipasi atas kesadaran sendiri, maupun partisipasi atas dasar pekerjaan atau kewajiban. Kompetensi sebagai pengelola pendidikan luar sekolah seolah tidak berguna ketika mereka lebih memilih untuk berprofesi di luar jalur kePLSan sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak pernah memprioritaskan tenaga kependidikan non formal dalam formasi penerimaan pegawai. Hal ini diperburuk dengan rendahnya pemahaman para pembuat kebijakan mengenai tenaga pendidik dan kependidikan non formal, sehingga rekrutmen pegawai di bidang pendidikan non formal masih banyak yang salah sasaran, dalam arti spesifikasi pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaannya.

Kebermacam-macam latar belakang pendidikan para pengelola PKBM memungkinkan terjadinya kesenjangan antara kompetensi pengelola yang seharusnya dimiliki dengan kompetensi yang sudah dimiliki, mengingat karakteristik pendidikan non formal sangat berbeda dengan pendidikan formal, dimana pemahaman akan karakteristik masyarakat, model-model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, model pembelajaran masyarakat dan manajemen program pendidikan non formal harus benar-benar dipahami dan dikuasai, sehingga program-program yang ada di PKBM dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Pengelola PKBM selama ini berasal dari lingkungan sekitarnya yang dianggap mampu menjalankan fungsi manajerial di PKBM, tanpa mempersyaratkan kemampuan-kemampuan tertentu harus dimiliki. Banyak para pensiunan PNS atau bahkan guru-guru SD sampai SMA yang terjun menjadi pengelola PKBM dilingkungannya. Kondisi ini disatu sisi memang menguntungkan, dimana pengelola sangat mengenal karakteristik dari warga masyarakat dimana PKBM tersebut didirikan, sehingga program-program bisa sangat sesuai dengan harapan masyarakat. Namun pengelolaan PKBM tidak cukup hanya dengan mengenal karakteristik masyarakat saja, akan tetapi masih banyak lagi yang perlu mereka kuasai supaya PKBM yang mereka kelola dapat berjalan dengan tertib.

Secara teknis, pengelola PKBM harus memiliki dukungan keterampilan maupun kompetensi khususnya dalam pengelolaan PKBM. Secara konseptual kompetensi menurut MC. Ashan adalah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya (Mulyasa, 2002). Menurut Art Anderson, kompetensi adalah karakter dasar yang terdiri dari kemampuan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) serta atribut personal lainnya yang mampu membedakan seseorang yang berkinerja baik dan yang berkinerja buruk.

Secara umum kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang, mencakup pengetahuan dan keterampilan atau kecakapan dan sikap, menekankan perilaku yang terukur sebagai aplikasi dari kompetensi yang dimiliki, menekankan pada keluaran atau hasil. Kompetensi dari pengelola PKBM dijabarkan dari tugas dan pekerjaannya, sehingga kompetensi pengelola PKBM adalah kemampuan yang harus dimiliki untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya (BPPLSP, 2004:11).

Standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengelola PKBM adalah:

- a. Kompetensi Personal Sosial
- b. Kompetensi Teknis
- c. Kompetensi Akademis
- d. Kompetensi Pengembangan Budaya

Dalam kompetensi personal, beberapa hal yang paling pokok yang harus dimiliki oleh pengelola PKBM antara lain: (1) memiliki nilai-nilai hidup; (2) aspek sikap terhadap kelompok sasaran; (3) aspek komunikasi personal; (4) aspek hubungan/kerjasama/sosial. Sedangkan dalam kompetensi teknis, beberapa hal pokok tersebut antara lain: (1) mampu merencanakan program PLS; (2) mampu memotivasi kelompok; (3) mampu mengorganisasi program; (4) mampu melaksanakan pembinaan; (5) mampu melaksanakan penilaian; (6) mampu membuat laporan; (7) memiliki jiwa kewirausahaan; dan (8) kemampuan dalam bidang ketatausahaan.

Kompetensi akademis meliputi: (1) memiliki pemahaman penguasaan konsep dasar PLS, yang meliputi pemahaman terhadap program-program PLS, program kepemudaan, program PAUD, program kemasyarakatan, memiliki keahlian keterampilan spesifik, pemahaman tentang konsep pendidikan orang dewasa, memahami konsep pendidikan sepanjang hayat, dan pemahaman tentang satuan PLS. Sedangkan untuk kompetensi pengembangan budaya, seorang pengelola PKBM dituntut memiliki pemahaman yang baik tentang budaya masyarakat, memahami nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, memahami adat istiadat, memahami bahasa, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan program PLS.

B. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Travers, 1978 dalam Husein, 1999). Metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsungnya proses riset (Gay, 1976 dalam Husein, 1999). Penelitian deskriptif memiliki bermacam-macam tujuan penelitian: 1) *description of phenomena or characteristic associated with a subject population*, 2) *estimate of the proportions of population that have these characteristic*, 3) *discovery of associations among different variables* (Cooper & Schindler, 2003).

Metode penelitian ini dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga dapat memberikan lebih banyak manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat pula diterapkan pada berbagai macam masalah. Penelitian ini akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota madya, antara lain: Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola PKBM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ukuran minimal sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan, yaitu sebagai berikut (Gay dalam Husein, 1999): Metode deskriptif minimal 10% populasi, untuk populasi relatif kecil minimal 20% populasi.

Dari batasan di atas dimana penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 20% dari jumlah populasi yang ada. Sampel merupakan pengelola PKBM yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota yang akan dipilih dengan menggunakan simple random sampling, setiap kabupaten dan kota akan diwakili oleh minimal 4 PKBM dimana setiap PKBM akan diwakili oleh beberapa pengelola hingga persyaratan minimal 10% sampel terpenuhi dari sekitar 528 populasi pengelola dari 176 PKBM di DIY.

Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, dokumentasi dan angket. Metode yang lebih mendominasi dalam proses pengumpulan data adalah dengan menggunakan angket. Angket adalah alat pengumpulan data berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.

Data yang terkumpul baik dari hasil pengamatan, dokumentasi dan angket akan dianalisis. Untuk mengetahui tingkat kompetensi dari pengelola PKBM, akan digunakan skala inventory test dengan 4 opsi. Instrument ini disesuaikan dengan teknik pengukuran dimana pengelola PKBM sebagai objek sekaligus subjek pengukuran dengan cara memberikan penilaian kemampuannya pada rentang skor 1 sampai 4, yang artinya kemampuan terendah diberi skor 1 dan kemampuan tertinggi diberi skor 4 (BPPLSP, 2004:19).

Untuk menentukan tingkat kemampuan pengelola PKBM berdasarkan kompetensi yang dikembangkan maka data hasil pengukuran kompetensi pengelola PKBM akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan rerata capaian kinerja pada masing-masing kompetensi. Unit analisis meliputi rerata kinerja pada setiap kompetensi dasar yang dipertajam dengan mengkaji rerata setiap indikator (BPPLSP, 2004:20), sehingga diperoleh klasifikasi distribusi nilai berdasarkan standar relatif atau *norm-referenced* (Arikunto: 1993), dimana kedudukan seseorang selalu dihubungkan dengan kawan-kawannya dalam kelompok.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Propinsi DIY berada pada peringkat ke 3 IPM dengan skor 70,8. Rata-rata usia harapan hidup penduduk 72,4 tahun. Persentase angka melek huruf dewasa adalah 85,9%. Rata-rata lama sekolah 8,1 tahun. Pengeluaran per kapita Rp 611,300,00. Dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index*) tahun 2002, Propinsi DIY berada pada peringkat ke-2 dengan skor 65.2. Rata-rata usia harapan hidup penduduk perempuan adalah 74,2 tahun, laki-laki 70,4 tahun. Persentase angka melek huruf untuk perempuan 77,5%, laki-laki 90,4%. Rata-rata tahun sekolah untuk perempuan 7,3 tahun dan laki-laki 9,0 tahun. Persentase proporsi tenaga kerja untuk perempuan adalah 44,4% dan laki-laki adalah 55,6%.

Ukuran pemberdayaan perempuan (*Gender Empowerment Measure*) menunjukkan bahwa Propinsi DIY berada pada peringkat ke-4 dengan skor 56,1. Persentase perempuan berada di parlemen adalah 9,1%, perempuan di posisi kepala, staff manajemen dan teknis adalah 37,4%, dan persentase tenaga kerja perempuan adalah 44,4%. Sementara itu, Indeks Kemiskinan Penduduk (*Human Poverty Index*) tahun 2002 menunjukkan bahwa Propinsi DIY berada pada peringkat ke 6 dengan skor 21,0. Usia harapan hidup penduduk sampai 40 tahun adalah 6,7%, persentase penduduk melek huruf 14,1%, penduduk tanpa akses air bersih 38,9%, penduduk tanpa akses fasilitas kesehatan 7,7 %, dan penduduk di bawah 5 tahun kurang makan adalah 16,9%.

Berdasarkan kabupaten, Kabupaten Sleman menempati urutan ke-30 untuk Indeks Pembangunan Manusia dengan angka harapan hidup mencapai 72,6 tahun, angka melek aksara orang dewasa 88,6 % dan rata-rata waktu sekolah adalah 9,7 tahun. Kabupaten Bantul menempati urutan ke-94 dengan angka harapan hidup mencapai 70,4 tahun, angka melek aksara orang dewasa 83,4 % dan rata-rata waktu sekolah adalah 7,6 tahun. Kabupaten Kulonprogo menempati urutan ke-76, dimana angka harapan hidup mencapai 72,6 tahun, angka melek aksara orang dewasa 83,1 %

dan rata-rata waktu sekolah adalah 7,3 tahun. Kabupaten Gunung Kidul menempati urutan ke-140 dengan angka harapan hidup 70,3 tahun, angka melek aksara orang dewasa 83,4 % dan rata-rata waktu sekolah adalah 7,3 tahun. Kota Yogyakarta menempati urutan ke-3 dengan angka harapan hidup mencapai 72,9 tahun, angka melek aksara dewasa 94,9 % dan rata-rata waktu sekolah adalah 10,7 tahun.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Kota Yogyakarta menempati posisi yang lebih baik dibandingkan dengan lainnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menempati peringkat ke-3 nasional dalam Indek Pembangunan Manusia, disusun kemudian Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul.

2. Karakteristik Responden

Analisis karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi: status pekerjaan, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan serta distribusi responden berdasarkan kabupaten atau kota. Tingkat pendidikan dikategorikan menjadi empat yaitu pendidikan SLTP, SLTA (SMA, SMK, SPG), Diploma (D2 dan D3), Mahasiswa, S1 dan pendidikan S2. Tabel karakteristik reponden berdasarkan status pekerjaan ditunjukkan dengan tabel 1. berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	25
2	Petani	4
3	Swasta	38
4	Guru	30
5	Pensiunan	3

Sumber: data penelitian diolah

Dari data di atas terlihat bahwa dari sampel yang diambil sebanyak 100 orang, diketahui bahwa sebagian besar pengelola PKBM berstatus pekerjaan swasta, guru dan pegawai negeri sipil, sedangkan bagian kecilnya adalah petani dan pensiunan. Berikutnya adalah data responden berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	53
2	Perempuan	47

Sumber: data penelitian di olah.

Karakteristik reponden berdasarkan jenis kelamin yang dijadikan sebagai sampel penelitian menunjukkan angka yang hampir sama yaitu laki-laki 53 orang (53 %) dan perempuan 47 orang atau (47 %). Berikutnya data responden berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	3
2	SMA	16
3	SMK	4
4	SPG	5
5	D2	9
6	D3	8
7	Mahasiswa	1
8	S1	49
9	S2	5

Sumber: data penelitian diolah.

Jumlah responden pengelola PKBM dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 49 ditambah 1 berstatus mahasiswa sehingga berjumlah 50 orang (50 %) lebih banyak dari yang lain. Responden dengan tingkat pendidikan SLTA berjumlah 25 orang (25%), dengan pendidikan diploma (D2 dan D3) berjumlah 17 orang (17%), pengelola dengan tingkat pendidikan S2 berjumlah 5 orang (5%) dan SLTP berjumlah 3 orang (3%). Jika dilihat dari tingkat pendidikan, seharusnya kemampuan akademis pengelola PKBM dapat dikatakan baik dan sebagian besar sudah memenuhi persyaratan sebagai pengelola. Akan tetapi jika dikaitkan dengan kompetensi sebagai pengelola belum bisa dipastikan, mengingat keberagaman latar belakang program studi atau jurusan non jurusan pendidikan luar sekolah yang mereka peroleh.

Berikutnya adalah distribusi responden berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan dalam tabel 4. sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Sleman	25
2	Bantul	16
3	Kulonprogo	27
4	Gunung Kidul	27
5	Kota Yogyakarta	5

Sumber: data penelitian diolah.

Dari tabel di atas dapat dilihat responden dari setiap kabupaten/kota kecuali Kabupaten Bantul 16 orang dan Kota Yogyakarta 5 orang memiliki jumlah yang hampir sama yaitu 25 dan 27 orang.

3. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan melakukan uji coba instrumen terhadap 30 orang responden pengelola PKBM di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Jawa Tengah.

Uji validitas yaitu pengujian terhadap kualitas item-item. Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor tiap butir (X) dengan skor total (Y) yang merupakan jumlah tiap skor, yang menggunakan rumus korelasi pearson product

moment. Syarat minimum untuk dianggap valid apabila $r > 0,361$ (Sugiyono, 2008). Dari hasil analisis melalui perhitungan SPSS 15 for windows, diketahui dari 64 item kuesioner, yang memenuhi syarat validitas berjumlah 54 item sedangkan 10 lainnya tidak valid dan direduksi. Adapun item yang direduksi antara lain: item nomer 5, 9, 10, 33, 34, 45, 47, 48, 49, dan 63.

Instrumen yang reliabel adalah instrumen tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya. Instrumen yang reliabel akan dapat menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Reliabilitas ditetapkan dengan melihat nilai Alpha Cronbach. Alat pengukuran dianggap reliabel jika nilai Alpha $> 0,5$. Hasil Alpha Cronbach pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items	Keterangan
,961	,962	54	Reliabel

Sumber; data penelitian diolah

4. Hasil Evaluasi Kompetensi

Evaluasi dilakukan terhadap kompetensi pengelola PKBM yang terdiri dari empat kompetensi utama yaitu: 1) kompetensi personal sosial, 2) kompetensi teknis, 3) kompetensi akademis dan 4) kompetensi pengembangan budaya.

a. Hasil Evaluasi Kompetensi Personal Sosial

Kompetensi Personal Sosial pengelola PKBM terdiri dari beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pengelola PKBM yaitu: 1) memiliki nilai-nilai hidup, 2) aspek sikap terhadap kelompok sasaran, 3) aspek komunikasi personal, 4) aspek hubungan/ kerja sama/ sosial. Kriteria evaluasi menggunakan 8 (delapan) klasifikasi terdiri dari: Sangat Baik Sekali (SBS), Baik Sekali (BS), Baik (B), Lebih Dari Cukup (LDC), Cukup (C), Kurang (K), Kurang Sekali (KS), dan Sangat Kurang Sekali (SKS). Setiap komponen kompetensi memiliki kriteria yang berbeda-beda sesuai dengan data empiris yang di peroleh dari lapangan. Berikut ini adalah hasil analisis evaluasi kompetensi personal sosial sebagai berikut:

Std Dev 4,85
mean 51,49

Sangat Baik Sekali	Mean + 1,75 S.D	59,98
Baik Sekali	Mean + 1,25 S.D	57,55
Baik	Mean + 0,75 S.D	55,13
lebih dari Cukup	Mean + 0,25 S.D	52,70
Cukup	Mean - 0,25 S.D	50,28
Kurang	Mean - 0,75 S.D	47,85
Kurang Sekali	Mean - 1,25 S.D	45,43
Sangat Kurang Sekali	Mean - 1,75 S.D	43,00

Hasil perhitungan standar deviasi dan rata-rata skor nilai responden, kemudian dibandingkan dengan skor nilai masing-masing responden berdasarkan kabupaten dan kota yang ada di Propinsi DIY. Hasil evaluasi ditunjukkan oleh tabel 6.

Tabel 6. Hasil Evaluasi Kompetensi Personal Sosial

Kabupaten	Status Penilaian Kompetensi								Jml
	SBS	BS	B	LDC	C	K	KS	SKS	
Sleman	1	1	1	5	2	5	2	8	25
Bantul	1		2	5	2	4	2		16
Kulon Progo	2	1	4	4	3	7	5	1	27
Gunung Kidul	1	2	6	6	6	6			27
Kota Yogyakarta		2				3			5
Jumlah	5	6	13	20	13	25	9	9	100

Sumber: data penelitian diolah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa 25% reponden menunjukkan tingkat kompetensi personal sosial Kurang, 20% Lebih Dari Cukup, 13 % Cukup, 9% Kurang Sekali dan Sangat Kurang Sekali, 6% Baik Sekali dan 5% Sangat Baik Sekali. Artinya hanya 24% pengelola PKBM yang masuk kategori baik sampai baik sekali, sedangkan sisanya sebanyak 76% belum sesuai dengan harapan. Kondisi ini menunjukkan masih sangat lemahnya penguasaan kompetensi personal sosial dari pengelola PKBM yang merupakan aspek kompetensi yang cukup penting terkait dengan nilai-nilai hidup, sikap pengelola terhadap kelompok sasaran, komunikasi yang baik antara pengelola dengan warga belajar ataupun dengan warga masyarakat dan hubungan pengelola dengan masyarakat dalam kerjasama dan kegiatan sosial. Aspek ini tentu saja sangat penting karena kelancaran program di masyarakat menuntut kompetensi personal yang baik dari pengelola agar program yang dilaksanakan di PKBM dapat berjalan dengan lancar.

b. Hasil Evaluasi Kompetensi Teknis

Kompetensi Teknis pengelola PKBM terdiri dari beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pengelola PKBM yaitu: 1) mampu merencanakan program PLS, 2) mampu memotivasi kelompok, 3) mampu mengorganisasi program, 4) mampu melaksanakan pembinaan, 5) mampu melaksanakan penilaian, 6) kemampuan dalam membuat laporan, 7) kewirausahaan, 8) ketatausahaan. Kriteria evaluasi menggunakan 8 (delapan) klasifikasi terdiri dari: Sangat Baik Sekali (SBS), Baik Sekali (BS), Baik (B), Lebih Dari Cukup (LDC), Cukup (C), Kurang (K), Kurang Sekali (KS), dan Sangat Kurang Sekali (SKS). Setiap komponen kompetensi memiliki kriteria yang berbeda-beda sesuai dengan data empiris yang di peroleh dari lapangan. Berikut ini adalah hasil analisis evaluasi kompetensi personal sosial sebagai berikut:

Std Dev 8,18
mean 77,97

Sangat Baik Sekali Mean + 1,75 S.D 92,29
Baik Sekali Mean + 1,25 S.D 88,20
Baik Mean + 0,75 S.D 84,11

lebih dari Cukup	Mean + 0,25 S.D	80,02
Cukup	Mean - 0,25 S.D	75,93
Kurang	Mean - 0,75 S.D	71,84
Kurang Sekali	Mean - 1,25 S.D	67,75
Sangat Kurang Sekali	Mean - 1,75 S.D	63,66

Tabel 7. Hasil Evaluasi Kompetensi Teknis

Kabupaten	Status Penilaian Kompetensi								Jml
	SBS	BS	B	LDC	C	K	KS	SKS	
Sleman	1		2	3	3	2	5	9	25
Bantul	1		2	8	2	1	2		16
Kulon Progo	1	1	4		13	3	3	2	27
Gunung Kidul	3		3	4	14	2	1		27
Kota Yogyakarta					4	1			5
Jumlah	6	1	11	15	36	9	11	11	100

Sumber: data penelitian diolah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 36% pengelola PKBM masuk kateri Cukup untuk kompetensi teknis, 15% masuk kategori Lebih Dari Cukup, 11% katergori Baik, Kurang Sekali dan sangat Kurang Sekali, 6% Sangat Baik Sekali dan 1% Baik Sekali. Kondisi ini tidak lebih baik dari kompetensi personal sosial, bahkan untuk kategori Baik sampai Sangat Baik Sekali hanya berjumlah 18% sedangkan sisanya 82% masuk kategori Lebih Dari Cukup sampai Sangat Kurang Sekali. Artinya kemampuan pengelola dalam merencanakan program PLS, memotivasi kelompok, mengorganisasi program, melaksanakan pembinaan, melaksanakan penilaian, membuat laporan, kewirausahaan dan ketatausahaan masih banyak yang tidak memenuhi syarat sebagai pengelola PKBM atau tidak layak sebagai pengelola, mengingat masih sangat rendahnya prosentase pengelola yang berkategori baik, baik sekali dan sangat baik sekali. Kompetensi teknis sangat vitas sekali dalam pelaksanaan program PLS, karena aspek-aspek manajerial pelaksanaan program ada dalam kompetensi ini, sehingga sangat dimungkinkan program yang dilaksanakan hanya asal jalan saja karena berdasarkan hasil evaluasi kemampuan mereka secara teknis sebagian besar tidak baik.

c. Hasil Evaluasi Kompetensi Akademis

Kompetensi Akademis pengelola PKBM terdiri dari beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pengelola PKBM yaitu: 1) memiliki pemahaman penguasaan konsep dasar PLS. Kriteria evaluasi menggunakan 8 (delapan) klasifikasi terdiri dari: Sangat Baik Sekali (SBS), Baik Sekali (BS), Baik (B), Lebih Dari Cukup (LDC), Cukup (C), Kurang (K), Kurang Sekali (KS), dan Sangat Kurang Sekali (SKS). Setiap komponen kompetensi memiliki kriteria yang berbeda-beda sesuai dengan data empris yang di peroleh dari lapangan. Berikut ini adalah hasil analisis evaluasi kompetensi personal sosial sebagai berikut:

Std. Dev	3,32
Mean	27,48

Sangat Baik Sekali	Mean + 1,75 S.D	33,29
Baik Sekali	Mean + 1,25 S.D	31,63
Baik	Mean + 0,75 S.D	29,97

lebih dari Cukup	Mean + 0,25 S.D	28,31
Cukup	Mean - 0,25 S.D	26,65
Kurang	Mean - 0,75 S.D	24,99
Kurang Sekali	Mean - 1,25 S.D	23,33
Sangat Kurang Sekali	Mean - 1,75 S.D	21,67

Tabel 8. Hasil Evaluasi Kompetensi Akademis

Kabupaten	Status Penilaian Kompetensi								Jml
	SBS	BS	B	LDC	C	K	KS	SKS	
Sleman		1	3	2	8	3	2	6	25
Bantul		1	4	1	6	4			16
Kulon Progo	2	2	2	4	9	2		6	27
Gunung Kidul	4	1	1	1	19			1	27
Kota Yogyakarta			1		4				5
jumlah	6	5	11	8	46	9	2	13	100

Sumber: data penelitian diolah

Berdasarkan pada data di atas, dapat dilihat bahwa kompetensi akademis pengelola dimana indikatornya adalah pemahaman penguasaan konsep dasar PLS sangat buruk, terlihat dari data yang menunjukkan bahwa 46% pengelola masuk dalam kategori Cukup, 13 % Sangat Kurang Sekali, 9% Kurang, 8% Lebih dari Cukup dan 2% Kurang Sekali, sedangkan sisanya yaitu 11% Baik, 6 % Sangat Baik Sekali dan 5% Baik Sekali.

d. Hasil Evaluasi Kompetensi Pengembangan Budaya

Kompetensi Pengembangan Budaya pengelola PKBM terdiri dari beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pengelola PKBM yaitu: memahami budaya masyarakat. Kriteria evaluasi menggunakan 8 (delapan) klasifikasi terdiri dari: Sangat Baik Sekali (SBS), Baik Sekali (BS), Baik (B), Lebih Dari Cukup (LDC), Cukup (C), Kurang (K), Kurang Sekali (KS), dan Sangat Kurang Sekali (SKS). Setiap komponen kompetensi memiliki kriteria yang berbeda-beda sesuai dengan data empiris yang di peroleh dari lapangan. Berikut ini adalah hasil analisis evaluasi kompetensi personal sosial sebagai berikut:

Std. Dev	1,11
Mean	9,19

Sangat Baik Sekali	Mean + 1,75 S.D	11,13
Baik Sekali	Mean + 1,25 S.D	10,58
Baik	Mean + 0,75 S.D	10,02
lebih dari Cukup	Mean + 0,25 S.D	9,47
Cukup	Mean - 0,25 S.D	8,91
Kurang	Mean - 0,75 S.D	8,36
Kurang Sekali	Mean - 1,25 S.D	7,80
Sangat Kurang Sekali	Mean - 1,75 S.D	7,25

Hasil perhitungan standar deviasi dan rata-rata skor nilai responden, kemudian dibandingkan dengan skor nilai masing-masing responden berdasarkan kabupaten dan kota yang ada di Propinsi DIY. Hasil evaluasi ditunjukkan oleh tabel 9.

Tabel 9. Hasil Evaluasi Kompetensi Pengembangan Budaya

Kabupaten	Status Penilaian Kompetensi								Jml
	SBS	BS	B	LDC	C	K	KS	SKS	
Sleman		2		7	10		4	2	25
Bantul		2		3	11				16
Kulon Progo	2	4		1	19			1	27
Gunung Kidul	2	1			19		2	3	27
Kota Yogyakarta					4			1	5
jumlah	4	9	0	11	63	0	6	7	100

Sumber: data penelitian diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kompetensi pengembangan budaya para pengelola PKBM juga masih sangat rendah, terlihat dari 63% pengelola masuk kategori Cukup, 11% Lebih Dari Cukup, 7% Sangat Kurang Sekali dan 6% Kurang Sekali, sedangkan sisanya 9% masuk kategori Baik Sekali dan 4% Sangat Baik Sekali.

e. Hasil Evaluasi Kompetensi Pengelola PKBM

Kompetensi personal sosial pengelola PKBM terdiri dari beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pengelola PKBM yaitu: 1) memiliki nilai-nilai hidup, 2) aspek sikap terhadap kelompok sasaran, 3) aspek komunikasi personal, 4) aspek hubungan/ kerja sama/ sosial. Kriteria evaluasi menggunakan 8 (delapan) klasifikasi terdiri dari: Sangat Baik Sekali (SBS), Baik Sekali (BS), Baik (B), Lebih Dari Cukup (LDC), Cukup (C), Kurang (K), Kurang Sekali (KS), dan Sangat Kurang Sekali (SKS). Setiap komponen kompetensi memiliki kriteria yang berbeda-beda sesuai dengan data empiris yang di peroleh dari lapangan. Berikut ini adalah hasil analisis evaluasi kompetensi personal sosial sebagai berikut:

Std Dev 15,25
mean 166,13

Sangat Baik Sekali	Mean + 1,75 S.D	192,82
Baik Sekali	Mean + 1,25 S.D	185,19
Baik	Mean + 0,75 S.D	177,57
lebih dari Cukup	Mean + 0,25 S.D	169,94
Cukup	Mean - 0,25 S.D	162,32
Kurang	Mean - 0,75 S.D	154,69
Kurang Sekali	Mean - 1,25 S.D	147,07
Sangat Kurang Sekali	Mean - 1,75 S.D	139,44

Hasil perhitungan standar deviasi dan rata-rata skor nilai responden, kemudian dibandingkan dengan skor nilai masing-masing responden berdasarkan kabupaten dan kota yang ada di Propinsi DIY. Hasil evaluasi ditunjukkan oleh tabel 10.

Tabel 10. Hasil Evaluasi Kompetensi Pengelola PKBM

Kabupaten	Status Penilaian Kompetensi								Jml
	SBS	BS	B	LDC	C	K	KS	SKS	
Sleman	1		2	5	2	4	1	10	25
Bantul	1		2	7	2	2	2		16
Kulon Progo	1	2	2	6	5	5	2	4	27
Gunung Kidul	2	1	4	5	10	4	1		27
Kota Yogyakarta				1	1	3			5
jumlah	5	3	10	24	20	18	6	14	100

Sumber: data penelitian diolah

Hasil evaluasi terakhir adalah penggabungan dari keempat standar kompetensi seorang pengelola PKBM yang terdiri dari Kompetensi Sosial, Kompetensi Teknis, Kompetensi Akademis, dan Kompetensi Pengembangan Budaya. Dari hasil evaluasi dapat dilihat bahwa sebagian besar pengelola tingkat kompetensinya masih rendah, terlihat dari data yang menunjukkan bahwa 24% pengelola masuk dalam kategori Lebih Dari Cukup, 20% Cukup, 18% Kurang, 14% Sangat Kurang Sekali dan 6% Kurang Sekali, sedangkan sisanya yaitu 10% masuk kategori Baik, 5% Sangat Baik Sekali dan 3% Baik Sekali.

f. Pembahasan

Dari data-data hasil evaluasi yang telah disajikan di atas dapat dilihat bahwa tingkat kompetensi PKBM yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar masih sangat rendah, perbandingan antara tingkat kompetensi dengan klasifikasi tinggi (Baik, Baik Sekali dan Sangat Baik Sekali) dan rendah (Kurang, Kurang Sekali dan Sangat Kurang Sekali) masih lebih banyak pengelola dengan klasifikasi rendah yaitu 18% : 38%. Namun data yang menunjukkan tingkat kompetensi dengan klasifikasi sedang lebih banyak yaitu 44%. artinya sebagian besar pengelola PKBM di Propinsi DIY kompetensinya Sedang dan tingkat kompetensi pengelola PKBM dengan klasifikasi tinggi sangat sedikit atau rendah.

Banyaknya pengelola PKBM yang masuk dalam klasifikasi sedang (Lebih Dari Cukup dan Cukup) dan rendah (Kurang, Sangat Kurang dan Sangat Kurang Sekali) yaitu sebanyak (76%) pada aspek Kompetensi Personal Sosial, memperlihatkan bahwa selama ini pengelola PKBM dalam mengelola tidak didasarkan pada nilai-nilai hidup, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, percaya diri, mandiri dan jujur. Disamping itu masih banyak pengelola yang tidak menyadari pentingnya menghargai warga belajar dan memahami kondisi mereka baik fisik maupun psikis, ditambah banyaknya pengelola yang masih rendah kemampuannya dalam proses komunikasi dengan masyarakat maupun warga belajar dan juga kerjasama antara sesama pengelola maupun dengan atasan.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi di atas, jumlah pengelola PKBM dengan klasifikasi Sedang (Lebih Dari Cukup dan Cukup) dan Rendah (Kurang, Kurang Sekali dan Sangat Kurang Sekali) yaitu mencapai (82%) menggambarkan tingginya jumlah pengelola PKBM yang tidak memahami proses perencanaan program PLS yang meliputi proses identifikasi, analisis kebutuhan prioritas, identifikasi potensi lingkungan, dan

lainnya. Masih banyak pengelola PKBM yang tidak memiliki kemampuan dalam memotivasi masyarakat maupun warga belajar yang dapat meningkatkan iklim kerja kondusif. Data di atas juga menunjukkan banyak pengelola PKBM tidak dapat melakukan pembinaan dan tidak mampu melakukan penilaian baik itu rencana penilaian, penyusunan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, maupun menganalisis, melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian. Yang lebih krusial dari kompetensi ini adalah kemampuan pengelola dalam melaksanakan kegiatan administrasi dimana hasil evaluasi menunjukkan banyak pengelola PKBM (82%) belum sesuai dengan harapan dalam memahami maupun melaksanakan tugas administrasi.

Kondisi serupa terjadi pada hasil penilaian kompetensi akademis, dimana kondisi pengelola yang masuk dalam klasifikasi Sedang (Lebih Dari Cukup dan Cukup) dan Rendah (Kurang, Kurang Sekali dan Sangat Kurang Sekali) menunjukkan angka yang tinggi yaitu 78% artinya banyak pengelola PKBM yang tidak memahami program PLS atau hanya cukup paham saja dalam memahami program PLS seperti program kepemudaan, program PAUD, program kemasyarakatan, konsep dasar PLS, konsep pembelajaran orang dewasa, konsep pendidikan seumur hidup, pemahaman tentang satuan-satuan PLS. Semakin banyak pengelola PKBM yang tidak paham substansi kompetensi akademis ini dapat menyebabkan program PLS yang diselenggarakan tidak sesuai dengan karakteristik pendidikan luar sekolah.

Evaluasi kompetensi pengembangan budaya sangat terkait dengan salah satu unsur masukan dalam pendidikan luar sekolah yaitu masukan lingkungan. Data penelitian menunjukkan bahwa bahwa 89% pengelola PKBM terklasifikasi Sedang dan Rendah dalam kompetensi pengembangan budaya. Namun dari 89% ini 74% diantaranya masuk kategori sedang. Meskipun tidak baik, namun pemahaman mengenai kebudayaan dan adat istiadat di masyarakat sudah cukup memadai dengan kemampuan sedang yang dimiliki oleh pengelola PKBM ini.

Hasil penelitian di atas menggambarkan bahwa selama ini tugas pengelola PKBM tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh sebagian besar pengelola karena tingkat kompetensi yang rendah. Padahal jika dilihat dari tugasnya, pengelola memiliki tugas yang cukup banyak antara lain: mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dasar, mengadakan konsolidasi program, menyusun program belajar sesuai dengan kebutuhan belajar masyarakat dan membuat peta program di setiap desa, menyusun rencana kerja mingguan, bulanan, tengah tahunan dan tahunan, menyiapkan kebutuhan administrasi pelaksanaan program, mencarikan dan menyiapkan kebutuhan buku, alat, tenaga / lembaga yang diperlukan dalam pelaksanaan program, mencatat kemajuan belajar warga belajar, mengamati dan mencatat pelaksanaan program belajar mengajar, mengawasi dan mengendalikan semua pelaksanaan program belajar, menyusun laporan bulanan, triwulan, tengah tahunan dan tahunan, memberikan saran-saran perbaikan program atau mengembangkan program belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi dan situasi daerah, memilih dan menentukan calon warga belajar untuk setiap jenis program belajar (Paket A, Paket B, Paket C, Kejar Usaha, Beasiswa, Magang, Kursus Diklusemas, dll), mengadakan rintisan program yang inovatif sesuai dengan potensi, kondisi dan situasi lingkungan sekitar, mengembangkan jaringan kerja, baik dengan dinas / instansi terkait, dunia usaha dan

lembaga keuangan, mengembangkan usaha produktif sesuai dengan permintaan pasar.

Salah satu penyebab rendahnya tingkat kompetensi pengelola PKBM adalah karena tingkat pendidikan yang cukup bervariasi, dimana dari 100 responden, yang berpendidikan S1 berjumlah 49 orang dan S2 sebanyak 5%, dimana jumlah ini pun tidak menggambarkan keahlian ke PLS an berdasarkan latar belakang pendidikan mereka, karena sebagian besar adalah sarjana non pendidikan luar sekolah, sehingga sangat wajar jika kompetensi mereka rendah, selain mereka yang berpendidikan S1 dan S2, 45% diantara mereka pendidikannya sangat bervariasi mulai dari lulusan SLTP, SMA, SMK, SPG, D2 dan bahkan D3 yang tentu saja relevansi keilmuan tentang ke PLS an sangat rendah.

D. Simpulan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kompetensi pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat rendah, hal ini dibuktikan dari hasil analisis yang menunjukkan masih banyaknya jumlah pengelola PKBM yang kualifikasi kompetensinya sangat rendah. Disamping itu efek dari rendahnya kompetensi ini juga terlihat dari lemahnya kualitas pengelolaan dan kelembagaan PKBM dalam menyelenggarakan program maupun dalam pengembangan kelembagaannya, sehingga sampai saat ini masih cukup sulit ditemui PKBM yang benar-benar mandiri dikelola secara profesional oleh pengelola PKBM sehingga fungsinya sebagai penyelenggara kegiatan belajar bagi masyarakat belum optimal.

Penyebabnya cukup bervariasi, salah satu diantaranya adalah para pengelola PKBM tidak didukung oleh latar belakang yang menunjang seperti tingkat pendidikan dan latar belakang pekerjaan. Dimana secara akademik mereka memang tidak dipersiapkan untuk menjadi pengelola PKBM karena latar belakang pendidikan yang tidak menunjang untuk hal tersebut.

Dari hasil penelitian ini ada beberapa rekomendasi yang sekiranya perlu mendapat perhatian dari instansi terkait agar kelembagaan PKBM ini dikemudian hari menjadi lebih baik, antara lain: (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten perlu memperhatikan keberlangsungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan meningkatkan kompetensi para pengelolanya; (2) Melaksanakan pendidikan dan latihan baik itu formal maupun non formal bagi para pengelola PKBM untuk meningkatkan kompetensi manajerial dalam mengelola PKBM dan meningkatkan kualifikasi akademisnya sehingga sesuai dengan kriteria sebagai tenaga kependidikan non formal yang profesional sesuai dipersyaratkan oleh Undang-undang.

Daftar Pustaka

- Arikunto. Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi revisi II, Rineka Cipta, Jakarta.
- BPKB Jawa Timur, 2000, *Modul Pendampingan*, Depdiknas, BPKB Propinsi Jawa Timur, Surabaya.
- BPPLSP, 2004, *Paket Pelatihan Pengelola PKBM Berbasis Kompetensi 2004*, Depdiknas, Dirjen PLSP, BPPLSP Regional III Jawa Tengah.
- Cooper, D.R., & Schindler, P.S., 2003, *Business Research Methods*, 8th ed. The McGraw-Hill Companies, Inc, New York.
- Direktorat Dikmas, 1998, Dirjen Diklusepora Depdikbud, *Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Masyarakat*, Jakarta.
- Hersey, P & Blanchard, K.H., 1982, *Management of Organizational Behavior Utilizing Human Resources (4th Ed)*, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffts, New Jersey.
- Husein Umar, 1999, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sudjana, 2000, *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Falah Production, Bandung.
- _____, 2003, *PKBM dalam Memberdayakan Masyarakat*, Visi Dirjen PLSP, Jakarta.
- _____, 2004, *Pendidikan Non Formal, Wawasan Sejarah Perkembangan Filafat Teori Pendukung Asas*, Falah Production, Bandung.